



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120
Telp (021) 3851970 (*Hunting*), Faksimili (021) 3502045
E-mail : banten@bpkp.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: S-872/PW30/6/2020 tanggal 1 bulan September tahun 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 1 September 2020

tw Kepala Perwakilan,

Muhammad Masykur
NIP 19640227 198402 1 001

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
Perwakilan BPKP Provinsi Banten

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan atas Akuntabilitas Keuangan Negara	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	rupiah (juta)	-	-	-	-	-	1	kegiatan pemeriksaan pajak negara/ daerah								
		Potensi penerimaan negara yang IKK pendukung:	rupiah	-	-	-	-	-	2	Bimbingan konsultasi terkait								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	rupiah	-	-	-	-	-	1	Evaluasi Optimalisasi Pendapatan								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							1	Audit Kinerja	7	9.540.000	Korwas IPP	laporan				1
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							2	Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral	8	28.320.000	Korwas IPP	laporan	1			2
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							3	Pengawasan Program Prioritas	8	45.020.000	Korwas IPP	laporan	2			4
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							4	Reviu Tata Kelola PSN	6	47.200.000	Korwas IPP	laporan	3			2
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							1	Reviu Tata Kelola PSN	6	132.160.000	Korwas IPP	laporan	7			7
2	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	-	-	-	-	-	1	Evaluasi atas program prioritas			Korwas IPP					
		IKK Pendukung:							2	Monitoring/evaluasi program prioritas								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							3	Pengawasan Prioritas Pemenuhan								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							1	Audit atas laporan keuangan	7	116.800.000	Korwas IPP	laporan				10
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							2	Audit verifikasi atas proyek ADB	7	46.720.000	Korwas IPP	laporan				4
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							3	Evaluasi lintas sektoral atas program prioritas	8	129.900.000	Korwas IPP	laporan			1	5
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							4	Monitoring lintas sektoral atas program	8	9.440.000	Korwas IPP	laporan				1
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan							5	Reviu atas program prioritas	7	21.120.000	Korwas IPP	laporan				2
3	Pengawasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP							1	Bimtek Pengendalian Risiko dan Manajemen Risiko	7	18.880.000	Korwas IPP	laporan				2
4	Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan PP 29/2020	Pengawasan Pengawasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19 Bidang Ketersediaan Bahan Pokok							1	Monitoring Ketersediaan Pangan	7	-						2

As

BIDANG INVESTIGASI																				
1	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai efisiensi: pengelutaran negara dan daerah (juta)	1.123	280,75	280,75	280,75	280,75	280,75	280,75											
2	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Pembangunan	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	75	-	-	-	-	-	75											
3	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil penguasaan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	100											
5		Persentase hasil Penguasaan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	70	-	-	-	-	-	70											
6		Jumlah KLU/Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	-	-	-	-	-	-	-											
7		Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	-	-	-	-	-	-	-											
BIDANG P3A																				
1	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KLU/PBU	Jumlah APJP Pemda dengan Kapabilitas APJP ≥ Level 3	8	5	0	0	0	0	3											
2		Quality Assurance atas hasil Self Assessment Kapabilitas APJP pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota A	5	12.350.000	Korwas Bidang P3A	1	-	-	1											
3		Monitoring Saran TL Aql Level 3 - Laporan Triwulan APJP pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota A	3	39.000.000	Korwas Bidang P3A	3	-	-	3											
4		Workshop/diseminasi/sosialisasi/koordinasi dalam rangka penguasaan atas percepatan penanganan covid 19	4	12.350.000	Korwas Bidang P3A	1	-	-	1											
1	Melakukan Self Assessment SAKIP Unit Kerja		3	0	Korwas Bidang P3A	3	-	-	3											
1	Melakukan Self Assessment SPP Unit Kerja		3	48.975.000	Korwas Bidang P3A	7	-	-	7											
1	Melakukan Self Assessment MIR Unit Kerja		3	0	Korwas Bidang P3A	3	-	-	3											
1	Melakukan Survei Kepuasan Layanan Unit Kerja		3	0	Korwas Bidang P3A	3	-	-	3											

13

